

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu bangsa. Bangsa yang peduli akan pencapaian pendidikan warga negaranya adalah bangsa yang maju. Karena kualitas pendidikan disuatu bangsa adalah tumpuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya pendidikan, anak akan mendapat bimbingan dan pembekalan agar mencapai perkembangan kedewasaan yang dikemudian hari anak mampu melaksanakan tujuan hidupnya dengan mandiri dan juga mengembangkan potensi yang ada pada diri anak. Pada saat ini, pendidikan adalah hal yang penting dan harus diutamakan disegala aspek kehidupan agar tercapainya bangsa yang maju dan berkembang dengan baik. Suatu bangsa dapat dilihat pencapaiannya dari kesesuaian antara tujuan dan yang sudah dicapai pada bidang pendidikan.

Pencapaian tujuan pendidikan ini harus memiliki usaha yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan juga tidak kalah penting peran dari pemerintah negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan di Indonesia bahwa tujuan dari Pendidikan Nasional yaitu mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sesuai dengan fungsi pendidikan nasional, memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan fasilitas, guna menjamin terlaksananya segala proses program pendidikan yang memiliki mutu tinggi bagi setiap warga negara Indonesia. Namun saat ini ada beberapa faktor yang menjadi penghambat untuk terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas. Berikut ini beberapa hambatan yang dapat mempengaruhi proses keberlangsungan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu, sarana yang tidak memadai (gedung sekolah, sarana olahraga, sarana

ekstrakurikuler dan rekreasi), perlengkapan praktik, alat peraga pendidikan, materi-materi pendidikan, kurangnya sinergi antara lembaga terkait dalam masyarakat, taraf pendidikan yang kurang baik dalam masyarakat, dan mahal biaya pendidikan sehingga menjadi banyak faktor yang menghambat proses pendidikan di Indonesia.

Salah satu usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menanggapi hal ini adalah dengan menyalurkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah yang telah terdaftar pada tingkat pendidikan tingkat dasar. BOS SD adalah program pendanaan yang diberikan secara langsung oleh pemerintah kepada pihak sekolah, besarnya dana yang diterima oleh pihak sekolah akan dihitung dengan mengacu pada jumlah siswa tiap sekolah dikalikan dengan besarnya satuan dana bantuan. Satuan biaya (unit cost) untuk program BOS SD sebesar Rp 900.000 per siswa (Kementerian Keuangan 2021). Dana tersebut diberikan kepada siswa tiap tahunnya. Tujuan utama dari BOS SD adalah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua elemen masyarakat.

Dana BOS mempunyai pengaruh penting pada dunia pendidikan yang harus dijalani oleh masyarakat yaitu program dari pemerintah pusat wajib belajar 9 tahun. Hal ini sudah dibuktikan bahwa dari program belajar 12 tahun dapat meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD pada tahun 2019 di Bantul ditingkat 104.64 % (Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta 2020). Meskipun angka partisipasi pendidikan terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, namun masih banyak juga anak Indonesia yang terpaksa harus putus sekolah dikarenakan tidak adanya biaya dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), pada tahun 2019 jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah berada diangka 1.228.792 anak (Tempo.co 2019). Dikarenakan masih tingginya angka anak sekolah dasar yang putus sekolah, maka dari itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya memberikan dana BOS secara langsung kepada pihak SD. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jenjang harapan sekolah dan penyediaan akses layanan pendidikan antar wilayah juga semakin meningkat.

Mengacu pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Pemerintah merancang acuan untuk program BOS SD yaitu Petunjuk Teknis BOS SD yang mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu berdasarkan prinsip fleksibilitas,

efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Konsep MBS ini pihak sekolah mempunyai wewenang untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Namun dalam beberapa kasus masih ditemukan pengelolaan dana BOS yang belum sesuai dengan prinsip yang ada, seperti pada penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019, ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan dana BOS. BPK menilai terdapat beberapa sekolah yang menggunakan dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan karena kurangnya pengawasan dan pembinaan kepada pihak sekolah dalam mengelola dana BOS (Rakyat 2019).

Adanya beberapa kasus dalam pengelolaan dana BOS tersebut, maka dirasa perlu dilakukan sebuah analisis guna mengetahui pelaksanaan dalam pengelolaan dana BOS dapat ditinjau dari 5 prinsip. Analisis digunakan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi yang dapat memberikan landasan dan kebijakan dalam membuat suatu keputusan. Analisis juga digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, analisis pengelolaan BOS dirasa penting untuk dilakukan, namun masih banyak pihak sekolah yang belum melaksanakan analisis mengenai pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Pada daerah Bantul sendiri, SD Negeri 1 Bantul termasuk sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah. Maka dari itu SD Negeri 1 Bantul diwajibkan mengelola dana BOS sesuai dengan 5 Prinsip Pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan pentingnya analisis tersebut merupakan salah satu aspek yang berperan dalam tercapainya program dana BOS yang sesuai dengan aturan yang ada. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal perolehan dana tersebut. SD Negeri 1 Bantul beralamatkan di Jalan Gatot Subroto, Mandingan, Ringinharjo, Soropaten, Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kelas yang dimiliki sekolah ini sebanyak 24 kelas atau rombongan belajar, dengan 711 siswa.

Melihat arti pentingnya analisis pengelolaan program dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional**

**Sekolah (BOS) (Studi pada SD Negeri 1 Bantul)”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 1 Bantul.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 1 Bantul sudah sesuai dengan 5 prinsip pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlaku?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka yang akan menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 1 Bantul sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan saat ini.

## **1.4 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan lebih fokus dalam menggali masalah yang muncul selama dilakukannya proses analisis pengelolaan dana BOS. Selain itu, hal ini berfungsi untuk meminimalkan adanya penafsiran ganda pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, permasalahan mengenai analisis pengelolaan dana BOS Nasional yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada SD Negeri 1 Bantul dibatasi dengan 5 prinsip pengelolaan BOS yang diatur dalam Petunjuk Teknis BOS tahun 2021 yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, transparansi.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis**

- 1) Dapat menjadi wacana dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangan penelitian, guna melakukan pengelolaan dana BOS yang

berfokus pada bidang pendidikan yaitu layanan yang diberikan oleh sekolah.

- 2) Dalam bidang pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan analisis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **1.5.2 Kegunaan Secara Praktis**

- 1) Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat berguna sebagai landasan pengelolaan dana BOS agar sesuai dan prinsip yang berlaku.
- 2) Bagi orang tua/wali siswa, penelitian ini diharapkan dapat membantu guna mengetahui penggunaan serta pengelolaan dana BOS secara transparan dan sesuai dengan prinsip yang berlaku.
- 3) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dalam menentukan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikemudian hari agar lebih efektif dan tepat sasaran.